This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi Sekolah Pada
Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri I Toho
Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah**

Agus Sikwan, Anggreini Y D

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura, Indonesia

E-mail: agus.sikwan@fisip.untan.ac.id

Abstract

This study is entitled: "Implementation of the School Accreditation Policy in the Public High School (SMU) I Toho, Toho District, Mempawah Regency". Using qualitative analysis, the results of this study indicate that the implementation of the school accreditation system policy implemented by the West Kalimantan Province School Accreditation Board (BAS) towards the Toho I State High School since 2005 has been going well, and has had a positive impact on the average increase passing grade results of the Final School Examination (UAS) obtained by students majoring in Social Sciences and Natural Sciences at Toho I State High School in 2017 to 2018 when compared with the average value of UAS results obtained by Toho I State High School students in 2014, despite the increase in grades the average UAS results obtained by the students were still unsatisfactory for students' parents and the school. The results also showed that the performance of the school principal as the bureaucratic apparatus of the Toho State High School I in providing administrative services to the school community was seen from the aspect of responsiveness which could be said to be good, because school residents felt there was a communication channel provided by the Toho District Education Office to convey their aspirations. In addition, the ability of the bureaucratic apparatus at the Toho District Education Office to recognize what the school community wants through direct interaction with them, causes the demands and desires of the school community to be poured by the Toho subdistrict Education Office in the form of a work program which then get a positive response from the principal of Toho I State High School to implement it.

Keywords: *Implementation, Accreditation Policy.*

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah melakukan akreditasi bagi setiap lembaga pendidikan sekolah secara nasional ini tertuang di dalam Surat Keputusan MENDIKNAS Nomor: 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah yang berlaku sejak tanggal 4 Juni 2002, dan Surat Keputusan MENDIKNAS Nomor: 039/O/2003 tentang Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Nasional yang berlaku sejak tanggal 8 April 2003.

Kebijakan dalam akreditasi sekolah yang dikembangkan oleh BAS Nasional, yaitu meliputi serangkaian kegiatan, baik yang dilakukan oleh sekolah melalui proses evaluasi diri maupun kegiatan visitasi ke sekolah yang dilakukan oleh asesor yang ditunjuk oleh BAS. Dan dalam kebijakan itu, disebutkan pula bahwa untuk melakukan akreditasi lembaga pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) di setiap Kabupaten dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS)

Provinsi yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur.

Di Propinsi Kalimantan Barat (Kalbar), kebijakan akreditasi sekolah pada Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri untuk setiap Kabupaten dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Propinsi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 103 Tahun 2005 tentang BAS Propinsi Kalimantan Barat. Adapun untuk pelaksanaan akreditasi SMU Negeri di seluruh Kabupaten yang terdapat di Propinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dibiayai dengan dana anggaran yang berasal dari APBD Propinsi.

Adapun kriteria penilaian akreditasi untuk setiap SMU yang ada di setiap kabupaten berdasarkan penilaian BAS Propinsi, antara lain didasarkan pada penilaian (1) Kurikulum dan proses pembelajaran; (2) Administrasi dan manajemen sekolah; (3) Organisasi/kelembagaan sekolah; (4) Sarana dan prasarana sekolah; (5) Ketenagaan; (6)

Pembiayaan dan pendanaan; (7) Peserta didik; dan (8) Lingkungan/kultur sekolah. Adapun jika delapan poin tersebut di atas masing-masing mendapatkan skor nilai 56 sampai nilai 70, maka sekolah yang bersangkutan memperoleh akreditasi C. Sedangkan apabila mendapatkan skor nilai kurang dari 56, maka sekolah tersebut tidak terakreditasi.

Meskipun kebijakan akreditasi sekolah untuk SMU Negeri yang ada di setiap Kabupaten telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2005 dengan tujuan agar SMU Negeri yang ada di setiap Kabupaten memiliki nilai akreditasi yang sangat memuaskan sehingga dapat membanggakan daerah dan kelulusan siswanya dapat bersaing di tingkat nasional, namun kenyataannya tidak semua SMU Negeri yang ada di Kabupaten memperoleh nilai akreditasi yang sangat memuaskan. Kenyataan ini seperti terjadi pada SMU Negeri I Toho Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat.

Sebelum kebijakan akreditasi sekolah diimplementasikan oleh pemerintah, SMU Negeri I Toho merupakan satu-satunya SMU Negeri yang sangat dibanggakan oleh masyarakat di Kecamatan Toho khususnya dan masyarakat di Kabupaten Pontianak umumnya. Karena SMU Negeri I Toho selain merupakan SMU pembina bagi SMU-SMU Swasta lainnya yang terdapat di Kabupaten Mempawah, juga sebagian besar masyarakat (orang tua murid) dari berbagai lapisan sosial di Kecamatan Toho menyekolahkan anak-anaknya di SMU Negeri I Toho ini.

Namun sejak kebijakan sistem akreditasi sekolah diimplementasikan oleh BAS Propinsi Kalbar pada tahun 2005, ternyata lembaga pendidikan SMU Negeri I Toho memiliki nilai akreditasi B (Kepala Sekolah SMUN I Toho, 2019). Dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMU Negeri I Toho, dan berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, maka dapat diketahui bahwa penyebab utama nilai akreditasi (nilai B) yang diperoleh lembaga pendidikan SMU Negeri I Toho ini, yakni selain disebabkan karena relatif rendahnya hasil penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh BAS Propinsi Kalbar, juga disebabkan karena kinerja kepala sekolah SMU Negeri I Toho dalam proses pelaksanaan kebijakan akreditasi sekolah pada SMU Negeri I Toho sangat kurang.

Meskipun pihak sekolah telah berupaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya, namun untuk meningkatkan kualitas dari lembaga pendidikan dan mutu kelulusan siswanya tidaklah semudah seperti

membalikkan telapak tangan. Kenyataan ini terbukti dari kondisi lembaga pendidikan formal (SMU Negeri I Toho) yang sejak diberlakukannya sistem akreditasi sekolah oleh BAS Propinsi Kalbar pada tahun 2005, dimana salah satu tugas BAS Propinsi adalah menetapkan peringkat akreditasi untuk seluruh SMU yang ada di Kabupaten. Dan berdasarkan hasil penilaian yang telah diberikan oleh pihak BAS, maka untuk SMU Negeri I Toho sejak dilaksanakannya akreditasi sekolah pada tanggal 2 Maret 2015 memperoleh nilai akreditasi B yang berlaku selama 4 tahun, yakni sejak ditetapkan nilai B oleh pihak BAS tanggal 5 Mei 2015 dan berakhir pada tanggal 5 Mei 2019.

Relatif rendahnya nilai akreditasi yang diperoleh SMU Negeri I Toho (nilai B) dalam pelaksanaan akreditasi sekolah yang dilakukan oleh BAS Propinsi Kalbar, disebabkan karena kurangnya kinerja kepala sekolah selaku aparat birokrasi SMU Negeri I Toho dalam memberikan pelayanan administrasi kepada warga sekolahnya, di samping karena berbagai faktor lain yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan akreditasi sekolah pada SMU Negeri I Toho tersebut. Namun dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh birokrasi pihak sekolah, lembaga pendidikan formal ini mampu untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya, dalam arti secara konsisten tiga tahun berturut-turut telah meluluskan peserta didiknya 100 %.

Pada dasarnya hakekat pendidikan berkaitan erat dengan hakekat manusia, karena kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang pendidikan berhubungan dengan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam upaya mendidik dan mempersiapkan manusia menghadapi lingkungannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Joni (1985: 21), yang mengatakan bahwa hakekat pendidikan antara lain: a. Pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh kemampuan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik; b. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang begitu cepat; c. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat; d. Pendidikan berlangsung seumur hidup; dan e. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya.

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Arbi (1992: 8), bahwa semenjak manusia dilahirkan telah dibekali dengan berbagai potensi-potensi,

dalam kenyataannya belum terpola untuk menghadapi lingkungan hidupnya. Disinilah letak keterbatasan manusia sebagai pembawa potensi untuk berkembang selanjutnya. Oleh karena itu, agar potensi-potensi yang telah menjadi modal dasar dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang-orang yang bertanggung jawab dan berpengalaman di bidang pendidikan tersebut.

Berbicara tentang masalah akreditasi sekolah, maka hal ini tidak terlepas dari masalah evaluasi diri dari lembaga pendidikan formal (sekolah) yang bersangkutan. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang menunjang sistim pendidikan, dan kekurangtepatan dalam memilih dan menerapkan program pendidikan, dapat berakibat pada ketidakberdayaan sekolah untuk merangkul berbagai masalah yang dihadapi oleh murid. Kegagalan yang dialami oleh sekolah dalam memperoleh nilai akreditasi yang tertinggi, dalam kajian teori pembangunan sering dianggap sebagai akibat dari ketidaktepatan dalam pemilihan program pembangunan yang dilaksanakan. Meskipun program pembangunan yang dipilih dan dilaksanakan tersebut bertujuan untuk menghindarkan diri jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan program (Korten dan Alfonso, eds, 1983).

Ketidakmampuan kinerja sekolah untuk meningkatkan mutu kelembagaannya dapat dihilangkan melalui mekanisme “efek tetesan ke bawah”. Logika dasar dari pendekatan ini adalah logika produktif, oleh karenanya Korten dan Klauss (1984: 65) menyebut sebagai pembangunan yang berpusat pada produksi. Dalam pendekatan ini, menurut Nugent dan Yotopoulos (1984: 107-120) ketidakmampuan kinerja suatu lembaga untuk meningkatkan kualitasnya dilihat sebagai proses yang akan terjadi dengan sendirinya sebagai fungsi dari manajemen organisasi kelembagaan yang tidak berjalan secara lancar (tidak produktif). Menurut Cernea (1988: 30), bahwa untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, selain manajemennya harus diperbaiki terlebih dahulu juga diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat. Untuk itu, maka melalui pengaktifan seluruh potensi yang dimiliki masyarakat dapat didorong untuk memiliki inisiatif, bekerjasama dan bertanggungjawab bersama terhadap kelangsungan suatu lembaga. Dengan kata lain, melalui partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam suatu kelembagaan, maka akan dapat tercipta lembaga yang berkualitas.

Menurut pendapat Soedjatmoko (1984: 35-45), bahwa untuk meningkatkan kualitas suatu

lembaga maka harus dilakukan sendiri oleh pihak manajemen yang mengelola lembaga tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka dapat dikatakan bahwa antusiasisme kegiatan yang ada dalam suatu lembaga merupakan ekspresi dari kegiatan yang berasal dari masyarakat bawah. Inisiatif masyarakat bawah berkaitan dengan inovasi atau penggunaan kembali teknologi yang tepat bagi kelembagaan.

Namun demikian, salah satu ciri yang sangat mencolok yang terdapat di negara berkembang adalah sangat besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh birokrasi dalam mengatur suatu lembaga formal yang dipimpinnya. Pemusatan kekuasaan ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan berbagai program kelembagaan, yaitu dengan cara memusatkan pengelolaan dana, memusatkan pembuatan keputusan dan kebijakan, ataupun memusatkan pengendalian program. Kenyataan ini disebabkan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah negara berkembang untuk mengelola suatu lembaga formal masih sangat kurang.

Pemusatan kekuasaan pemerintah pada suatu lembaga inilah yang dikritik masyarakat golongan bawah. Masyarakat golongan bawah cenderung tidak mempercayai motif dan kemampuan pemerintah dalam mengelola suatu lembaga yang dipimpinnya, sehingga yang terjadi justru mengeksploitasi masyarakat demi dan atas nama suatu lembaga. Padahal menurut mereka, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki potensi untuk memecahkan persoalan yang dihadapi suatu lembaga melalui inisiatif bersama yang mandiri (Esman, 1991: 30).

Sebelum diberlakukannya sistim akreditasi sekolah oleh BAS Propinsi Kalbar, SMU Negeri 1 Toho merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang sangat dibanggakan oleh masyarakat dan memiliki reputasi yang baik. Namun setelah diberlakukannya sistim akreditasi sekolah oleh BAP Propinsi, maka yang terjadi pada SMU tersebut adalah sebaliknya. Sehubungan dengan hal itu, maka dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dari kinerja lembaga pendidikan formal tersebut, diperlukan adanya suatu unit organisasi sekolah yang secara khusus menangani kegiatan operasional di lapangan. Salah satu bentuk organisasi yang sering digunakan oleh suatu lembaga formal dalam upaya meningkatkan kualitasnya dimasyarakat adalah terletak pada birokrasi. Menurut Katz (1985:5) hal ini disebabkan karena birokrasi adalah satu-satunya organisasi yang memiliki akses penguasaan atas seluruh sumber daya. Oleh karenanya di negara berkembang pada umumnya, aparat birokrasi dalam suatu lembaga formal adalah

pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program daripada organisasi kemasyarakatan lainnya. Tentang kemampuan birokrasi ini, Effendi (1987: 4-7) mengatakan bahwa: Berbagai studi teoritis maupun empiris mengakui bahwa birokrasi yang sangat mengagungkan rasionalitas dan efisiensi merupakan bentuk organisasi yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan dan modernisasi. Sehingga dikebanyakan negara dunia ketiga, birokrasi pemerintah adalah alat pembangunan yang utama dan paling dominan peranannya. Dominasi birokrasi ini terjadi bukan semata-mata karena kelemahan sektor swasta dan preferensi ideologi di negara-negara berkembang, tetapi lebih karena luasnya jangkauan birokrasi memiliki fungsi integratif amat besar.

Tjiptoherijanto dan Yumiko (1983: 45-60) bahkan menyatakan bahwa pengaruh birokrasi terhadap lembaga yang dipimpinnya telah menembus hingga ke dalam masyarakat pedesaan. Di desa-desa Kecamatan Toho misalnya, pengaruh birokrasi atas sekolah telah mulai nampak secara lebih menyolok terlihat mulai tahun 1980-an.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk memahami birokrasi, konsepsi Weber tentang manajemen merupakan konsep yang paling terkenal. Weber mengajukan teori birokrasi dalam kerangka teorinya tentang dominasi, dimana Weber menyebut hubungan kekuasaan melalui aparat *legal-rational-domination* sebagai birokratisasi (Mouzelis, 1982: 52). Weber yakin bahwa birokrasi rasional pasti bertambah penting dalam masyarakat modern. Hal ini disebabkan birokrasi memiliki serangkaian ciri-ciri: kecermatan, kontinuitas, disiplin, ketat, dapat diandalkan, yang membuat bentuk organisasi birokrasi paling memuaskan dari segi teknis. Baik bagi pemegang otoritas maupun bagi semua pihak yang terlibat dalam organisasi. Disini Weber menyatakan bahwa birokratisasi merupakan proses yang tidak terelakan. Tetapi sebagai bagian dari proses ke arah rasionalisasi, maka birokrasi cenderung berimplikasi pada pemisahan orang-orang dari sarana produksi, dan pertumbuhan umum ke arah formalisme dalam organisasi.

Meskipun demikian pendapat Weber tentang birokrasi ini ditentang oleh Korten dan Alfonso. Dalam pemikiran Korten dan Alfonso (1983: 35), manajemen pemerintahan sangatlah tidak mungkin dilaksanakan. Hal ini menurut Effendi (1987: 25) disebabkan karena antara birokrasi dan demokrasi merupakan sistem-sistem pemerintahan yang berlawanan dan tidak dapat dipersatukan. Analisis Effendi (1987) juga menunjukkan, organisasi

birokrasi yang dibentuk untuk melaksanakan program pembangunan justru memperlemah kemampuan kelompok masyarakat untuk mempengaruhi program tersebut.

Kritik lain datang dari Tjokrowinoto (1992). Menurut birokrasi seringkali dibarengi dengan kekuasaan yang memiliki legalitas. Melalui kekuasaan yang legalitas ini para pejabat dapat mengatur bawahan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Kondisi yang demikian ini pada akhirnya menciptakan birokratisasi, meskipun sebenarnya perubahan melalui mekanisme manajemen tidak diperlukan.

Lebih lanjut Effendi (1986: 18) setelah menyimak studi-studi yang dilakukan oleh Sjoberg, Brymer dan Farris (1966); serta Rein (1958) memperoleh kesimpulan bahwa organisasi birokrasi ternyata kurang mampu dan karena itu kurang cocok untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu lembaga. Di samping itu birokrasi bahkan cenderung mempertahankan ketimpangan yang terdapat dalam lembaga yang ada.

Menurut pendapat Hadad (1983: 8) hal ini disebabkan antara lain: Birokrasi telah mempunyai pola kerja yang sudah mapan, dan langkah-langkah tindakannya harus selalu mengikuti kebijaksanaan umum atau menunggu petunjuk dari atasan, serta dilakukan melalui jalur formal dan jenjang hirarki yang cukup panjang. Keadaan ini membuat birokrat tidak mempunyai peluang yang cukup untuk mengambil keputusan atau bertindak dengan cepat, kurang punya fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijaksanaan dengan kondisi setempat, dan kurang punya kepekaan untuk memperhatikan masalah-masalah khusus dan kebutuhan khas kelompok masyarakat daerah pedesaan yang sering muncul silih berganti.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Tjokrowinoto (1992: 33) menunjukkan bahwa sosok perilaku birokrasi yang tepat bagi upaya meningkatkan mutu dari suatu lembaga yang dipimpinnya adalah perilaku birokrasi yang dapat melaksanakan fungsi kelembagaan, yaitu menciptakan iklim agar bawahan dapat mengembangkan berbagai potensinya, baik potensi sosial, intelektual, mental spiritual, maupun fisiknya secara optimal, dan fungsi integrasi, diferensiasi struktural dan fungsional, serta tekanan bawahan terhadap sumber daya yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, nampak bahwa perilaku birokrasi yang dipersyaratkan bagi pencapaian keberhasilan tujuan suatu kelembagaan adalah perilaku birokrasi yang kondusif dan adaptif terhadap tumbuhnya aspirasi masyarakat, mampu

memberikan ruang gerak bagi bawahan untuk mengartikulasikan kepentingannya, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kegiatan kelembagaan.

Upaya untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan akreditasi sekolah apada SMU Negeri 1 Toho, di sini tidak sekedar dibutuhkan perilaku birokrasi (Kepala Sekolah) yang bertindak sebagai penyalur pelayanan administrasi, tetapi lebih dari itu dibutuhkan perilaku birokrasi selaku pimpinan sekolah yang memandang masyarakat sbagai pendukung kegiatan akreditasi tersebut.

Dalam konteks penilaian kinerja organisasi pelayanan publik, Dwiyanto (1995:11) mengatakan lima indikator dalam penilaian kinerja birokrasi pelayanan publik. *Pertama*, produktivitas. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. *Kedua*, kualitas layanan. Kualitas layanan cenderung semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk tentang organisasi publik muncul karena ketidakpastian dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. *Ketiga*, responsivitas yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. *Keempat*, tanggungjawab yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik atau sesuai dengan kebijakan organisasi. *Kelima*, akuntabilitas yaitu menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih rakyat.

Menurut Kumorotomo (Dwiyanto, 2002 :20) bahwa kreteria yang dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain sbb : 1. Efisiensi, menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kreteria sperti likuiditas, kemampuan membayar hutang (solvabilitas), dan rentabilitas (hasil investasi) merupakan kreteria efisiensi yang sangat relevan. 2. Efektivitas, Apakah tujuan dari

didirikannya organisasi pelayanan tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. 3. Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. Keadilan menjadi hal yang sangat penting demi tercipta kedamaian. Kreteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu menjawab melalui kreteria ini. 4. Daya tanggap, Berbeda dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kreteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kreteria daya tanggap ini.

Sementara itu, Ratminto (2006:179) mengatakan bahwa untuk mengukur kinerja harus dipergunakan dua jenis ukuran, yaitu ukuran yang berorientasi pada proses dan ukuran yang berorientasi pada hasil. Adapun ukuran atau indikator-indikator yang berorientasi pada hasil adalah efektivitas, produktivitas, efisiensi, kepuasan, dan keadilan. Ukuran yang berorientasi pada proses yaitu responsivitas, tanggungjawab, akuntabilitas, keadaptasian, kelangsungan hidup, keterbukaan atau transparansi dan empati.

Berdasarkan beberapa pendapat dan penjelasan dari para ahli mengenai konsep konsep atau pengertian tentang kinerja, pengukuran kinerja dan pentingnya pengukuran kinerja, maka penelitian ini menggunakan ukuran sebagai variabel kinerja pelayanan yakni akuntabilitas, responsivitas, efisiensi, orientasi terhadap pelayanan, dan fasilitas pelayanan.

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup masalah penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Proses implementasi kebijakan akreditasi sekolah yang dilaksanakan oleh pihak SMU Negeri 1 Toho selama ini dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikannya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu

penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan sesuai keadaan yang sebenarnya, dengan prosedur pemecahan masalah berdasarkan keadaan sebagaimana adanya (apa adanya). Sedangkan menurut Nawawi (2005: 31), bahwa penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah, diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Adapun yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah anggota Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Provinsi Kalbar, Kepala sekolah, para guru /staf pengajar dan tenaga administrasi/TU pada SMU Negeri 1 Toho. Di samping itu, penulis juga menggunakan jasa informan kunci yang terdiri dari: Kepala Dinas Pendidikan di Kecamatan Toho, Orang tua murid, dan Tokoh masyarakat setempat. Melalui informasi yang penulis peroleh dari informan dan informan kunci ini maka barulah penulis dapat mengetahui dan menganalisis masalah penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Ada 3 (tiga) teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yakni adalah: 1. Wawancara mendalam (*In-depth Interview*), kegiatan ini dimaksudkan untuk mengadakan percakapan dengan subjek penelitian (informan) dengan maksud untuk mendapatkan informasi secara lebih mendalam mengenai kegiatan pelaksanaan kebijakan akreditasi sekolah pada SMU Negeri 1 Toho yang bersangkutan dengan berbagai peristiwa, yakni seperti: proses pelaksanaan kebijakan akreditasi sekolah pada Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Toho; kinerja kepala sekolah selaku aparat birokrasi SMU Negeri 1 Toho, faktor faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan akreditasi sekolah pada SMU Negeri 1 Toho, dan lain sebagainya.

Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan untuk menjangkau informasi yang lebih luas dan mendalam dilakukan secara intensif terhadap sejumlah informan. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas informan dan informan kunci, dapat pula mewawancarai informan yang tidak selalu terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan akreditasi sekolah, tetapi banyak mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Sedangkan teknik alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam teknik ini adalah pedoman wawancara yang telah

dipersiapkan sebelumnya. 2. Pengamatan tidak berperan serta (*Observation non partisipation*), kegiatan ini penulis lakukan dengan tidak berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan akreditasi sekolah. Di lokasi penelitian penulis mengadakan penyempurnaan catatan lapangan, melakukan klarifikasi data lapangan, menyusun transkripsi rekaman wawancara, melakukan observasi dan wawancara yang berkaitan dengan data yang relevan dan membina hubungan baik dengan Kepala Sekolah, guru dan staf administrasi. Melalui observasi non partisipasi (pengamatan tidak berperan serta) ini, penulis mencatat dan merekam semua kejadian sebagaimana terjadi dalam peristiwa yang sebenarnya. Pengamatan juga dilakukan terhadap proses pelaksanaan kebijakan akreditasi sekolah, kinerja kepala sekolah selaku aparat birokrasi SMU Negeri 1 Toho dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan akreditasi sekolah pada SMU Negeri 1 Toho tersebut. Adapun alat pengumpulan data yang penulis gunakan untuk teknik ini adalah pedoman observasi. 3. *Studi Dokumenter*, kegiatan ini penulis lakukan untuk menggali data sekunder yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini. Dokumen pada umumnya diperoleh dari dokumen milik SMU Negeri 1 Toho, dokumen milik Dinas Pendidikan Kecamatan Toho, dan dokumen dari instansi lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Adapun alat pengumpulan data yang penulis gunakan untuk teknik studi dokumenter ini adalah foto copi.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Berg dan Taylor (Moleong, 1990: 3) bahwa analisis kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatan seperti ini biasanya diarahkan kepada latar belakang individu secara holistik atau utuh dan menyeluruh. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang-orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, berusaha memahami bahasa mereka dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 1996: 5). Adapun data yang terkumpul, digunakan deskriptif analisis tanpa mengenyampingkan data-data dalam bentuk angka-angka yang diperoleh dari data sekunder.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah tepatnya pada Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Toho, dengan pertimbangan yakni: SMU Negeri 1 Toho merupakan salah satu SMU Negeri yang terdapat di

Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah yang telah dijadikan sebagai “*proyek percontohan*” bagi SMU-SMU Negeri kecamatan lainnya di Kabupaten Mempawah dalam pelaksanaan kebijakan akreditasi sekolah yang diterapkan oleh BAS Propinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

SMU Negeri 1 Toho adalah SMU pembina bagi SMU-SMU Swasta yang terdapat di Kabupaten Mempawah, dan merupakan satu-satunya SMU Negeri favorit yang sangat dibanggakan oleh masyarakat di Kecamatan Toho pada khususnya, dan di Kabupaten Mempawah pada umumnya, namun memiliki nilai akreditasi B.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan relevansi dengan permasalahan serta tujuan penelitian tentang implementasi kebijakan akreditasi sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga pendidikan formal, maka SMU Negeri I Toho dianggap sangat representatif sebagai lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Pada SMU Negeri 1 Toho

Pada umumnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di tanah air, pemerintah Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan hal tersebut. Kenyataan ini terlihat dengan banyaknya pemerintah Indonesia menambah jumlah sarana pendidikan di pelosok tanah air, agar pendidikan khususnya pendidikan di tingkat atas benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Adapun ukuran keberhasilan pendidikan tidak hanya dilihat dari banyaknya sarana pendidikan yang tersedia, akan tetapi yang lebih terpenting adalah bagaimana lembaga pendidikan tersebut mengelola dan menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan agar diperoleh hasil pendidikan yang bermutu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya pemerintah melalui pelaksanaan akreditasi sekolah dapat dikatakan tepat dalam upaya akuntabilitas mutu pendidikan kepada masyarakat.

Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Menurut ketentuan pasal 86 ayat (3) PP Nomor 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa: Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Pendidikan Nasional. Dalam pada itu, setiap jenjang pendidikan sudah selayaknya untuk mengajukan akreditasi bagi

sekolahnya.

Akreditasi sebagai proses penilaian terhadap kelayakan dan kinerja sekolah merupakan kegiatan yang bersifat menyeluruh dalam memotret kondisi nyata sekolah dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan diperolehnya informasi yang komprehensif tersebut, hasil akreditasi sangat berguna sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana strategis sekolah untuk masa empat tahun dan rencana operasional tahunan sekolah.

Untuk mendapatkan status akreditasi bagi satuan pendidikan setingkat sekolah lanjutan atas, beberapa tahapan harus dilalui oleh sekolah tersebut. Setiap sekolah lanjutan atas yang akan mengajukan akreditasi harus mengetahui betul bagaimana mekanisme akreditasi ini. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah SMU Negeri 1 Toho (2019), maka dapat diketahui bahwa mekanisme akreditasi.

Dapat dijelaskan bahwa mekanisme akreditasi sekolah pada SMU Negeri 1 Toho diawali dengan kegiatan evaluasi diri. Setelah melalui beberapa proses tahapan, maka Badan Akreditasi Sekolah (BAS) akan mengeluarkan sertifikat tentang status akreditasi sekolah pada SMU Negeri 1 Toho yang mengajukan permohonan akreditasi tersebut.

Pada umumnya Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Toho yang akan mengajukan akreditasi kepada Badan Akreditasi Sekolah (BAS), maka pada tahap pertama SMU Negeri 1 Toho tersebut harus melakukan kegiatan evaluasi diri terlebih dahulu. Sementara itu, pihak sekolah yang bersangkutan harus mengisi berbagai macam aspek evaluasi yang harus diisikan dalam format instrumen evaluasi. Format instrumen evaluasi ini diterbitkan oleh Badan Akreditasi sekolah. Adapun hal-hal yang dievaluasi mulai dari input, proses dan output dari SMU Negeri 1 Toho. Adapun input dari SMU Negeri 1 Toho meliputi jumlah pendaftar, proses meliputi bagaimana kegiatan pokok pembelajaran dilaksanakan, bagaimana sumberdaya yang tersedia, bagaimana evaluasi pembelajaran dilaksanakan dan lain-lain. Sedangkan output dari SMU Negeri 1 Toho mencakup bagaimana keberhasilan siswa dalam menempuh pendidikan pada sekolah menengah umum tersebut.

Setelah tahap evaluasi selesai dilaksanakan pada SMU Negeri 1 Toho yang terangkum dalam dokumen evaluasi diri, selanjutnya SMU Negeri 1 Toho harus mengajukan dokumen evaluasi kepada Badan Akreditasi sekolah (BAS). Berdasarkan dokumen evaluasi yang diajukan oleh SMU Negeri I Toho, maka BAS akan melakukan *desk evaluation*

untuk menilai kelayakan dokumen yang diajukan. Tahap ini dikenal dengan tahap kelayakan visitasi. Kelayakan visitasi adalah kelayakan untuk melakukan visitasi (kunjungan) ke SMU Negeri 1 Toho.

Apabila SMU Negeri 1 Toho telah mendapatkan surat kelayakan visitasi, maka selanjutnya adalah kunjungan oleh Tim Asesor yang ditunjuk oleh BAS. Adapun Tim Asesor akan melakukan Verifikasi data, kesesuaian data yang tercantum dalam dokumen instrumen evaluasi, dan lain-lain. Selain itu tim asesor juga akan melakukan tinjauan ke lapangan langsung terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh pihak sekolah, melakukan wawancara kepada para siswa dan dewan guru. Semua hasil yang diperoleh dari kunjungan lapangan ini selanjutnya akan diolah oleh BAS untuk menetapkan hasil akreditasi. Sebagai tahap akhir dari mekanisme pengajuan akreditasi ini adalah penerbitan Sertifikat akreditasi oleh BAS. Penerbitan sertifikat akreditasi ini ditetapkan melalui rapat pleno Badan Akreditasi Sekolah di tingkat Provinsi yang telah diberi wewenang oleh Gubernur untuk mengeluarkan sertifikat akreditasi.

Kinerja Kepala Sekolah (Aparat Birokrasi) SMU Negeri 1 Toho

Akuntabilitas

Pada umumnya kepala sekolah SMU Negeri 1 Toho sebagai aparat birokrasi yang berfungsi sebagai Pimpinan (manajer) Administrasi dan Supervisor sekolah yang memiliki kekuasaan tertinggi pada SMU Negeri 1 Toho, mempunyai tugas memberikan pelayanan dan penyelenggaraan administrasi kepada warga sekolah sebagaimana yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Toho, umumnya hanya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Toho selaku atasannya langsung. Sedangkan dalam hal peningkatan kualitas sekolah dan warga sekolahnya, ia (kepala sekolah SMU Negeri 1 Toho) tidak bertanggung jawab secara penuh. Kenyataan ini seperti diungkapkan oleh seorang guru SMU Negeri 1 Toho bernama AS (35 th), yakni sebagai berikut:

Saya adalah guru tetap SMU Negeri 1 Toho, sudah hampir sepuluh tahun lamanya saya mengajar di sekolah ini. tapi sampai sekarang kualitas sekolah dan kualitas siswa di sini tidak ada peningkatan yang berarti. Jadi tidak mengherankan jika akreditasi sekolah ini nilainya dapat C. Karena kepala sekolah tidak bertanggung jawab sepenuhnya dalam upaya meningkatkan kualitas siswanya. Adapun tanggung jawab peningkatan kualitas siswa dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah diserahkan

sepenuhnya kepada para guru yang mengajar di SMU Negeri 1 Toho.

Berdasarkan pengakuan dari informan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas aparat birokrasi (Kepala sekolah SMU Negeri 1 Toho) kepada warga sekolah, hanya sebatas pada tanggung jawab dalam hal prosedur penerimaan siswa baru dan penetapan biaya administrasi saja, tidak pada tanggung jawab pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan dalam peningkatan kualitas siswanya, sehingga tidak mengherankan jika dari 98 orang siswa SMU Negeri 1 Toho yang terdiri jurusan IPS sebanyak 79 orang siswa dan jurusan IPA sebanyak 19 orang siswa yang mengikuti Ujian Akhir Nasional dan Ujian Sekolah pada tahun 2018 memperoleh rata-rata nilai hasil kelulusannya, baik untuk jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) maupun jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) relatif rendah atau tidak begitu memuaskan.

Akuntabilitas kepala sekolah selaku aparat birokrasi SMU Negeri 1 Toho dalam penelitian ini dilihat melalui konsistensi kebijakan yang telah dibuat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mempawah yang sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat, dan kemampuan aparat birokrasi dalam merealisasikan kebijakan yang telah dibuat tersebut, serta acuan pelayanan publik pada warga sekolah yang dipergunakan aparat birokrasi dalam pelaksanaan tugas.

Tidak sesuai nya kegiatan atau program kerja yang dilakukan Kepala sekolah SMU Negeri 1 Toho dengan aspirasi warga sekolah hal ini seperti diakui oleh Kepala Tata Usaha SMU Negeri 1 Toho dalam wawancara sebagai berikut: Selama ini penentuan program kerja atau prioritas pekerjaan yang menyangkut penyelenggaraan administrasi sekolah ataupun supervisor cenderung tidak melibatkan warga sekolah. Memang pada awalnya warga sekolah dilibatkan dalam forum musyawarah, tetapi itu hanya sebatas menampung aspirasi warga sekolah saja, sedangkan untuk realisasi program kerja itu sendiri warga sekolah jarang ada yang dilibatkan karena alasan keterbatasan dana dan alasan lain sebagainya dari pemerintah.

Kemampuan aparat birokrasi dalam merealisasikan kebijakan organisasi seharusnya sudah dapat terdeteksi dari ketidakmampuan dalam menyusun program kerja atau kegiatan yang dapat dilakukan selama setahun. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam menentukan prioritas kegiatan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengenali kebutuhan warga sekolah. Kelemahan itu tidak terletak pada staf pelaksana di tingkat bawah

dan menengah yakni staf administrasi dan para guru. Kepala sekolah SMU Negeri 1 Toho hanya mau untuk melaksanakan program kerja apabila sesuai dengan arahan atau perintah dari atasannya langsung.

Responsivitas

Aspek responsivitas dapat dilihat dari adanya saluran komunikasi bagi warga sekolah untuk menyampaikan aspirasi atau kebutuhannya kepada Kepala sekolah SMU Negeri 1 Toho. Saluran komunikasi ini sangat diperlukan bagi warga sekolah agar mereka dapat menyalurkan aspirasi atau kebutuhan yang diharapkan, sedangkan bagi lembaga pendidikan yakni SMU Negeri 1 Toho merupakan sarana untuk menerima saran, kritik dan keluhan warga sekolah sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Toho (informan kunci) dalam suatu wawancara dengan penulis, yakni: Di dalam menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan kepada warga sekolah tentunya kami sebagai aparat birokrasi kecamatan harus dan selalu menerima kritikan, saran dan keluhan-keluhan dari warga sekolah. Untuk itulah, kami selalu membuka diri terhadap kebutuhan dan aspirasi warga sekolah baik itu saat jam dinas maupun di luar jam dinas. Saat jam dinas, kantor selalu terbuka bagi warga sekolah. Begitu juga dengan di luar jam dinas, kami pun selalu membuka pintu rumah kami untuk warga sekolah yang menyampaikan aspirasinya. Perlu diketahui bahwa warga sekolah SMU Negeri 1 Toho itu selalu menyampaikan aspirasinya pada saat adanya pertemuan-pertemuan resmi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Toho, dan tak jarang pula mereka menyampaikannya langsung kepada aparat birokrasi Dinas Pendidikan Kecamatan Toho baik di kantor maupun di rumah sebagaimana yang saya sebutkan tadi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Toho melalui para aparat birokasinya selalu membuka diri terhadap berbagai aspirasi warga sekolah SMU Negeri 1 Toho baik berupa keluhan-keluhan, saran maupun kritikan. Adapun hubungan antara aparat birokrasi Dinas Pendidikan Kecamatan Toho dengan warga sekolah SMU Negeri 1 Toho sangat penting dan harus terjalin dengan baik, demi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas sekolah ke depan.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, terkadang warga sekolah segan bahkan takut untuk menyampaikan aspirasinya mengingat perilaku aparat birokrasi (Kepala sekolah SMU Negeri I

Toho) yang sangat arogan, walaupun aparat birokrasi Dinas Pendidikan kecamatan Toho telah membuka dirinya untuk menerima aspirasi dari warga sekolah. Biasanya warga sekolah menyampaikan aspirasinya melalui orang lain yang dapat dipercaya, seperti orang tua/wali siswa.

Efisiensi

Efisiensi diartikan sebagai penghematan waktu dan biaya dalam rangka penyelenggaraan evaluasi diri yang dilakukan oleh Kepala sekolah dan para guru SMU Negeri 1 Toho. Kepala sekolah SMU Negeri 1 Toho memang belum menetapkan standar waktu dan biaya dalam rangka pelaksanaan akreditasi sekolah. Hal ini terungkap dari hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah SMU Negeri 1 Toho (informan), yakni sebagai berikut: Dalam memberikan pelayanan administrasi kepada warga sekolah, kami akan berusaha semaksimal mungkin memuaskan mereka. Termasuk salah satunya memberikan pelayanan administrasi kepada warga sekolah yang tepat waktu. Kami tidak pernah menetapkan waktu kapan suatu pelayanan administrasi tersebut dapat selesai. Biasanya kami selalu cepat menyelesaikan suatu urusan terutama dalam pelaksanaan evaluasi diri dalam rangka akreditasi sekolah, namun terkadang ada kendala jika kami atau bawahan kami yang berwenang dalam urusan tersebut tidak berada di tempat. Dan mengenai kendala tersebut, warga sekolah biasanya dapat memakluminya. Itulah yang terjadi di SMU Negeri 1 Toho ini, kami akan selalu cepat menyelesaikan pelayanan administrasi sekolah jika tidak ada kendala yang berarti.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Kepala sekolah SMU Negeri 1 Toho telah melakukan upaya untuk menyelesaikan suatu urusan secepat mungkin dan menyediakan waktu untuk itu terutama dalam memberikan pelayanan administrasi sekolah yang tepat waktu, meskipun untuk pelayanan administrasi kepada warga sekolah tersebut tidak pernah ditetapkan kapan waktu pelayanan administrasi itu selesai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Kepala sekolah dan para guru SMU Negeri 1 Toho dari aspek efisiensi biaya dapat dikatakan baik karena warga sekolah dapat mengetahui biaya meskipun masih ada biaya tertentu yang harus dijelaskan dengan baik. Dari segi waktu belum bisa dikatakan baik karena Kepala sekolah belum memberikan kepastian waktu dalam menyelesaikan pelayanan administrasi kepada warga sekolah. Meskipun pihak kepala sekolah dan para guru SMU Negeri 1 Toho telah menyatakan sikapnya kepada warga sekolah

bahwa mereka akan memberikan pelayanan administrasi yang terbaik, namun dalam prakteknya hal itu belum terealisasi dengan baik.

Orientasi Terhadap Pelayanan

Kepala sekolah SMU Negeri 1 Toho selaku aparat birokrasi yang melayani warga sekolah harus memiliki orientasi terhadap pelayanan agar disaat warga sekolah memerlukan pelayanan administrasi, mereka telah siap untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan warga sekolah. Orientasi terhadap pelayanan sebenarnya menunjuk pada ukuran seberapa besar sumber daya yang dimiliki oleh Kepala sekolah digunakan untuk melayani pengguna pelayanan (warga sekolah).

Kepala sekolah yang tidak memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan pokoknya memberikan pelayanan kepada warga sekolahnya, maka kinerjanya akan semakin baik. Hal ini disebabkan karena untuk melayani kebutuhan warga sekolah diperlukan konsentrasi maksimal dari kepala sekolah agar pelaksanaan pekerjaannya dilakukan dengan sepenuh hati dan penuh rasa tanggung jawab.

Berkaitan dengan aspek orientasi terhadap pelayanan, berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah SMU Negeri 1 Toho selaku aparat birokrasi (informan) yang mengatakan sebagai berikut: Saya ini adalah kepala sekolah SMU Negeri I Toho, dan mengabdikan di sekolah ini kurang lebih sudah 15 tahun. Saya dan keluarga hidup dari gaji sebagai Pegawai Negeri, dan berapalah gaji pegawai negeri tersebut anda kan tahu sendiri. Meskipun ada tunjangan jabatan sebagai kepala sekolah, namun hanya pas-pasan untuk hidup sebulan, bahkan saya mesti mencari tambahan penghasilan lainnya. Jadi wajar saja kalau saya mencari tambahan lainnya di luar jam dinas. Memang tugas utama saya adalah memberikan pelayanan administrasi kepada warga sekolah dan saya akan selalu memberikan pelayanan itu kepada warga sekolah, namun di luar jam dinas, saya memanfaatkan untuk mencari tambahan penghasilan yang terkadang cukup menyita waktu yang menyebabkan saya sampai-sampai tidak masuk kantor, terutama kalau saya pergi ke luar daerah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala sekolah SMU Negeri 1 Toho telah berusaha untuk memberikan perhatian terhadap pelayanan administrasi terhadap warga sekolahnya, dan mereka menyadari bahwa tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai negeri sipil yakni memberikan pelayanan administrasi yang terbaik kepada warga sekolah. Kepala sekolah SMU Negeri I Toho akan selalu berusaha memberikan

pelayanan kepada warga sekolah sebaik-baiknya, namun dengan berbagai kesibukan di luar jam kerja rata-rata Kepala sekolah SMU Negeri 1 Toho mencari tambahan penghasilan, terkadang tugas pokoknya untuk memberikan pelayanan kepada warga sekolahnya terabaikan.

Fasilitas Pelayanan.

Para pemberi dan penerima jasa pelayanan administrasi pada SMU Negeri 1 Toho akan dapat merasa nyaman berada di lingkungan kerja apabila adanya fasilitas-fasilitas fisik pelayanan berupa ruang tunggu yang memadai, sarana informasi yang tersedia, dan peralatan-peralatan kerja yang cukup di dalam pemberian pelayanan. Fasilitas-fasilitas tersebut akan sangat mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan pelayanan administrasi terhadap warga sekolah di SMU Negeri 1 Toho karena suatu pelayanan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak di dukung oleh fasilitas yang memadai.

Untuk melihat bagaimana fasilitas pelayanan administrasi yang ada di SMU Negeri 1 Toho, berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala TU SMU Negeri 1 Toho, yakni sebagai berikut:

Untuk memberikan pelayanan administrasi, segala fasilitas yang ada dan dimiliki sekolah ini masih kurang memadai. Bapak bisa melihatnya sendiri bahwa segala fasilitas yang ada di sini masih kurang lengkap, maklumlah pak namanya saja sekolah di kampung. Hanya saja kondisi beberapa fasilitas tersebut kurang layak dipakai seperti mesin ketik yang bisa dipakai hanya dua buah sedang yang lain rusak. Untuk fasilitas komputer sekarang sudah tiga buah dan disimpan di Laboratorium komputer. Adapun dua buah dalam kondisi baik sedangkan satu buah rusak dan sedang diperbaiki. Sedangkan untuk pelayanan administrasi kepada warga sekolah terdapat satu buah komputer di ruang TU. Dan fasilitas komputer inilah bagi kami yang membantu dalam mempermudah pelayanan administrasi kepada warga sekolah.

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa segala fasilitas pelayanan administrasi sudah tersedia di SMU Negeri 1 Toho. Namun demikian, masih terdapat juga fasilitas yang rusak yang tidak memadai untuk pemberian pelayanan kepada warga sekolah. Peralatan kerja yang tidak memadai tersebut seharusnya diperbaiki agar dapat digunakan kembali, karena umumnya kerusakan pada peralatan kerja dapat menghambat kerja pegawai staf administrasi pada SMU Negeri 1 Toho di dalam memberikan pelayanan administrasi kepada warga sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana

yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, pelaksanaan kebijakan sistim akreditasi sekolah yang diterapkan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Propinsi Kalbar terhadap SMU Negeri 1 Toho pada tahun 2015 telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif dalam upaya peningkatan kualitas siswa SMU Negeri 1 Toho Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak.

Kenyataan ini terlihat jelas dari adanya peningkatan perolehan nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah (UAS) dari tahun 2014 meningkat pada tahun 2015 dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2006 baik pada siswa jurusan IPS maupun siswa jurusan IPA, meskipun kenaikan nilai rata-rata UAS yang diperoleh itu masih jauh dari yang diharapkan oleh pihak sekolah, perilaku kepala sekolah selaku aparat birokrasi pada SMU Negeri 1 Toho yang memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan administrasi kepada warga sekolah kurang memperhatikan aspirasi yang berkembang di kalangan warga sekolahnya. Berbagai keluhan yang disampaikan warga sekolah SMU Negeri 1 Toho kepada kepala sekolah melalui saluran yang tersedia tentang kurangnya perhatian terhadap peningkatan kualitas sekolah dan kualitas kelulusan siswa, tidak mendapat tanggapan apa-apa dari kepala sekolah yang bersangkutan, pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepala sekolah SMU Negeri I Toho kepada warga sekolahnya, hanya sebatas pada tanggung jawab dalam hal prosedur penerimaan siswa baru dan penetapan biaya administrasi untuk masuk SMU Negeri 1 Toho, tidak pada tanggung jawab pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam peningkatan kualitas sekolahnya. Sedangkan tanggung jawab kepala sekolah terhadap warga sekolahnya dalam pembuatan kebijakan dan atau pengambilan keputusan sepenuhnya diserahkan kepada wakil kepala sekolah, kinerja kepala sekolah SMU Negeri 1 Toho dalam pemberian pelayanan administrasi kepada warga sekolahnya dilihat dari aspek responsivitas dapat dikatakan baik, karena warga sekolah merasa adanya saluran komunikasi yang disediakan Dinas Pendidikan Kecamatan Toho untuk menyampaikan aspirasinya. Selain itu, adanya kemampuan yang dimiliki aparat birokrasi pada Dinas Pendidikan Kecamatan Toho untuk mengenali apa yang menjadi keinginan warga sekolah melalui interaksi langsung dengan mereka, menyebabkan apa yang menjadi tuntutan dan keinginan warga sekolah tersebut dituangkan oleh Dinas Pendidikan kecamatan Toho dalam bentuk program kerja yang kemudian mendapatkan respon

positif dari kepala sekolah SMU Negeri 1 Toho untuk melaksanakannya, dan faktor utama yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan akreditasi sekolah pada SMU Negeri 1 Toho yang menyebabkan sekolah tersebut memperoleh nilai B antara lain adalah karena kepemimpinan kepala sekolah yang bersikap kurang terbuka, minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki SMU Negeri 1 Toho, dan kurangnya peran tenaga pendidik (guru) dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah.

SARAN

Kepala sekolah SMU Negeri I Toho selaku pelaksana kebijakan akreditasi sekolah hendaknya menerapkan manajemen sekolah berdasarkan pada prinsip keterbukaan dan tanggung jawab yang tinggi. Disamping itu juga, kepala sekolah hendaknya dapat memberikan motivasi dan kesempatan bagi para guru dan tenaga administrasi yang bekerja di SMU Negeri I Toho agar mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin dalam rangka meningkatkan kualitas kelulusan siswa dan kualitas sekolah. Adapun hal ini dimaksudkan agar nilai akreditasi B yang diperoleh oleh SMU Negeri I Toho dapat segera ditingkatkan untuk mencapai nilai yang lebih baik demi untuk meningkatkan kualitas sekolah dan kualitas kelulusan siswanya.

Daftar Rujukan

- Arbi, Sutan Zanti. 1993. *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bryant, Coralie dan White, Louise G. 1987. *Manajemen Pembangunan: Untuk Negara Berkembang*. Alih bahasa Rusyanto L. Simatupang, Jakarta: LP3ES.
- Cernea, Michael., ed. 1988. *Mengutamakan Manusia di Dalam Pembangunan: Variabel-Variabel Sosiologi di Dalam Pembangunan Pedesaan*. Alih Bahasa Basilius Bengo Teku. Jakarta: UI Press.
- Dahlan, Alwi. 1980. "Jaringan Komunikasi Sosial di Pedesaan Sebagai Saluran Pemerataan Informasi", dalam: Alfian (ed.), *Kemiskinan Struktural*, Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial
- Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*. Yogyakarta: UGM Press
- Dwiyanto, Agus dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi*

Publik di Indonesia. Yogyakarta: PSKK-UGM.

Effendi, Sofian. 1987. *Debirokrasi dan Deregulasi : Upaya Meningkatkan Kemampuan Adminitrasi Untuk Melaksanakan Pembangunan*, Yogyakarta: Mimeograph.

_____. 1986. "Pelayanan Publik, Pemerataan dan Administrasi Negara Baru", *Prisma* No.12, Desember 1986. Jakarta: LP3ES.

Esman, Milton J. 1991. *Management Dimentions of Development: Perspectives and Strategies*. West Hartford, Connecticut. Kumarian Press.

Esman, Milton J and Uphoff, Norman T. 1984. *Local Organizations: Intermediaries in Rural Development*. Ithaca: Cornell University Press.

Hadad, Ismid. 1983. "Menampilkan Potret Pembangunan Berwajah Swadaya Masyarakat", *Prisma* No. 4. April 1983. Jakarta: LP3ES.

Islamy, Irfan. 1994. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Joni, Raka. 1985. *Wawasan Kependidikan Guru*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Katz, William. 1985. "Case and Community Development" dalam World Bank Staff Working Paper No.403. *Implementing Programs of Human Development*, Washington D.C.: The World Bank.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 087/U/2002 Tentang *Pelaksanaan Akreditasi Sekolah*.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 039/U/2003 Tentang *Badan Akreditasi Sekolah Nasional*.

Korten, David C. 1984. *Pembangunan Yang Memihak Rakyat: Kupasan tentang Teori dan Metode Pembangunan*. Alih Bahasa Nirwono. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.

_____. 1992. *Menuju Abad ke-21. Tindakan Sukarela dan Agenda Global. Pendahuluan: Kita Menghadapi Masalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Korten, David C. and Felipe B. Alfonso (ed.). 1983. *Bureaucracy and the Poor: Closing the Gap*. Connecticut. Kumarian Press.

Korten, David C. and Rudi Klauss (eds.). 1984. *People Centered Development: Contribution toward Theory and Planning Frameworks*. USA : Kumarian Press.

Mc Quail, Dennis. 1991. *Teori Komunikasi Massa*. (Terjemahan), Jakarta: Erlangga.

Moleong, S. Lexy. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Mouzelis, Nicos P. 1982. *Organization and Bureaucracy: An Analysis of Modern Theories*. Chicago: Aldine Publishing Company.

Nasution, Zulkarnain. 1998. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*, Jakarta: PT. Rajawali Press.

Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.

Nawawi, Hadari. 2005. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nugent, Jefrey B. and Yotopoulos. 1984. "Ortodox Development Economics versus the Dinamics of Concentration and Marginalization". dalam David C. Korten and Rudi Klauss (eds.). *People Centered Development: Contributions toward Theory and Planning Frameworks*. Connecticut. Kumarian Press.

Ratminto, 2006, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Setiawan, Bambang. 1989. *Pelapisan Sosial dan Jaringan Komunikasi*, Disertasi Doktor, Yogyakarta: PPs UGM.

Soedjatmoko. 1984. *Pembangunan dan Kebebasan*.

Jakarta: LP3ES.

Tjiptoherijanto, Prijono dan Yumiko M. Prijono.
1983. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*. Jakarta:
Sinar Harapan dan Lembaga Penerbit FE UI.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. *Perencanaan
Pembangunan*, Jakarta: PT. Gunung Agung.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1987. *Politik
Pembangunan: Sebuah Analisis, Konsep,
Arah dan Strategi*. Yogyakarta: PT. Tiara
Wacana.

_____. 1992. “Manajemen Pembangunan
Masyarakat”, dalam Sofian Effendi, Sjafrin,
M. Alwi Dahlan (ed.) *Membangun
Martabat Manusi : Peranan Ilmu-Ilmu Sosial
Dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press.

Thoha, Muhamad. 1987. *Manajemen Modern*.
Jakarta : PT. Rajawali Press.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional